



Etika dan Moralitas Politik Islam di Ruang Digital

Romario Rahadian Kiswoyo

Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Email Konfirmasi: romariorahadian@iainmadura.ac.id

Abstrak

Perkembangan politik Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital sebagai arena baru bagi ekspresi moral dan etika sosial di kalangan Muslim. Dalam konteks ini, muncul fenomena penjaga moral digital yang berupaya menegakkan nilai-nilai Islam melalui media daring sebagai bentuk dakwah politik sekaligus partisipasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika politik Islam dan kewargaan Muslim yang beretika dalam ruang politik digital di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji karya-karya akademik terbaru mengenai politik Islam, etika digital, dan moralitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik moralitas Islam di ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana keterlibatan politik yang beretika, tetapi juga memperkuat kesadaran publik dan tanggung jawab sosial di kalangan Muslim. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap bahwa politik Islam kontemporer di Indonesia tengah bergeser menuju paradigma etika digital yang menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab moral, dan keadaban publik. Transformasi ini menyoroti peran Muslim sebagai warga digital yang beretika, yang berkontribusi pada pembentukan budaya politik yang sadar moral dan bertanggung jawab secara kewargaan di Indonesia.

Kata kunci: Etika, Moralitas, Politik Islam, Ruang Digital

Pendahuluan

Perkembangan politik Islam di Indonesia selama dua dekade terakhir menunjukkan transformasi yang kompleks, terutama ketika ruang digital telah menjadi arena baru bagi ekspresi moral, dakwah, dan kontestasi politik. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai platform perdebatan nilai dan legitimasi politik Islam. Di tengah banjir informasi dan polarisasi politik, muncul fenomena penjaga moral digital, yaitu kelompok atau individu yang berupaya menegakkan nilai-nilai Islam di dunia maya melalui seruan moral, kampanye etika, dan dakwah politik. Fenomena ini mencerminkan upaya menjaga

integritas moral Islam di tengah disrupsi budaya digital yang sering ditandai dengan perilaku serba bebas nilai dan pragmatis (Ismail, 2022).

Tren tersebut merupakan upaya serius untuk menjaga integritas moral Islam di tengah budaya digital yang kerap mengabaikan nilai etika dan tanggung jawab sosial. Di ruang digital, batas antara benar dan salah, baik dan buruk, sering kali menjadi kabur karena dominasi informasi yang cepat, dangkal, dan sensasional. Dalam kondisi demikian, nilai-nilai moral Islam memiliki peran penting sebagai kompas spiritual yang membimbing masyarakat agar tetap berpegang pada prinsip kejujuran, kesantunan, dan tanggung jawab dalam interaksi daring. Integritas moral menjadi benteng utama dari perilaku destruktif seperti fitnah, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Karena itu, penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat tidak hanya melek teknologi, tetapi juga bijak dalam merespons arus informasi, menjaga etika komunikasi, menumbuhkan empati sosial, dan menegakkan etika media dalam kerangka etika politik Islam yang berkelanjutan serta peradaban Islam yang luhur di Indonesia modern.

Upaya menjaga integritas moral juga membutuhkan kesadaran kolektif bahwa ruang digital bukanlah wilayah tanpa hukum. Setiap tindakan menulis, mengomentari, atau mengunggah mencerminkan identitas dan etika seorang Muslim. Karena itu, pengguna media digital harus memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, termasuk etika komunikasi dan tanggung jawab terhadap dampak sosial dari informasi yang dibagikan. Sikap ini menunjukkan kedewasaan dalam penggunaan media sekaligus menjadi bentuk dakwah yang menghadirkan Islam yang santun dan beradab di tengah hiruk pikuk dunia digital.

Lebih lanjut, menjaga integritas moral Islam di era digital berarti menghidupkan kembali kesadaran etis dalam setiap aspek kehidupan daring. Hal ini mencakup pengakuan bahwa teknologi hanyalah alat, sedangkan nilai moral adalah penuntun penggunaannya. Dengan menanamkan etika dalam aktivitas digital, umat Islam dapat menjadikan media sosial sebagai sarana penyebaran kebaikan, penguatan solidaritas, dan pengembangan ilmu yang bermanfaat. Dengan demikian, kehadiran Muslim di ruang digital bukan sekadar mengikuti arus global, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengikis spiritualitas dan kemanusiaan.

Dalam khazanah pemikiran Islam, moralitas politik dikenal sebagai etika politik Islam, yakni sistem nilai dan prinsip etika yang mengatur perilaku politik umat Islam berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Etika politik Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), dan keadilan sosial. M. Quraish Shihab (2019) menjelaskan bahwa etika

dalam politik Islam tidak hanya mencakup perilaku individu, tetapi juga tanggung jawab sosial serta tata kelola yang menjunjung tinggi keadilan dan amanah. Dengan demikian, etika politik Islam berfungsi sebagai landasan normatif agar aktivitas politik tetap berada dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Etika dalam politik Islam bukan hanya menyangkut perilaku pribadi para pemimpin atau individu yang terlibat dalam aktivitas politik, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial yang lebih luas terhadap masyarakat dan wilayah kekuasaan. Etika menuntut kesadaran bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan ketulusan. Dalam konteks ini, seorang pemimpin dituntut memiliki integritas moral yang kuat sehingga setiap kebijakan mencerminkan nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama tanpa diskriminasi. Etika politik membimbing para pelaku agar memegang teguh prinsip etis yang mulia dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih jauh dari sekadar pedoman etika, etika politik Islam menjadi landasan normatif yang mengarahkan aktivitas politik agar tidak menyimpang dari amar ma'ruf nahi munkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini berfungsi sebagai kontrol moral yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan perilaku manipulatif yang merugikan masyarakat. Dalam kerangka ini, politik tidak lagi dipandang semata-mata sebagai arena perebutan kepentingan, tetapi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, etika politik Islam menekankan bahwa setiap tindakan politik harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat tatanan sosial yang berlandaskan keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral.

Sebaliknya, praktik politik Islam yang tidak etis sering kali menunjukkan penyimpangan dari etika politik Islam, seperti memanfaatkan agama untuk kepentingan elektoral, menyebarkan ujaran kebencian atas nama dakwah, serta menyebarluaskan disinformasi untuk menjatuhkan lawan politik (Rahmad, 2021). Tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika politik Islam, tetapi juga merusak citra dakwah dan menurunkan standar moral publik di ruang digital. Pemahaman tentang etika politik Islam menjadi penting untuk menilai dan membimbing perilaku politik umat Islam di era digital. Praktik tidak etis ini mencerminkan terkikisnya nilai-nilai dalam kehidupan beragama dan berbangsa, karena tindakan yang dilakukan atas nama agama justru menimbulkan ketegangan dan kebencian antarindividu atau kelompok. Ketika ajaran Islam yang semestinya menjadi sumber kedamaian dan keadilan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kelompok sempit, nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang menjadi terpinggirkan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan pada tokoh dan institusi keagamaan,

sehingga semakin sulit membedakan kepentingan spiritual dan kepentingan pragmatis. Dalam jangka panjang, hal ini mengikis kesadaran moral kolektif dan melemahkan solidaritas sosial sebagai fondasi kehidupan berbangsa yang harmonis.

Dalam konteks ini, peran organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sangat penting. Muhammadiyah, dengan visi Islam Berkemajuan, menekankan dakwah digital yang berbasis rasionalitas, pencerahan, dan keadaban publik. Sementara itu, NU dengan prinsip tasamuh (toleransi), tawassuth (moderat), dan tawazun (keseimbangan) mengedepankan etika keagamaan moderat dan kesantunan dalam komunikasi digital (Fauzi, 2023). Kedua organisasi tersebut berperan sebagai "penjaga moral bangsa", khususnya dalam membangun ekosistem politik digital yang etis dan beradab.

Organisasi-organisasi ini memikul tanggung jawab besar dalam menjaga moral publik dan membimbing peradaban bangsa di tengah dinamika politik digital yang semakin kompleks. Peran mereka tidak hanya sebagai lembaga keagamaan atau sosial, tetapi sebagai penjaga nilai-nilai etis yang seharusnya mewarnai seluruh aktivitas politik di ruang digital. Melalui pembinaan moral dan pemberdayaan masyarakat, mereka memastikan praktik politik tetap memiliki makna moral serta selaras dengan nilai kebenaran dan keadilan. Dengan pengaruh yang luas, keduanya menjadi benteng penting terhadap penyimpangan digital yang berpotensi merusak tatanan sosial dan harmoni kebangsaan.

Selain itu, mereka berperan penting dalam menumbuhkan budaya politik digital yang lebih santun dan beradab. Mereka mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Melalui pendidikan digital yang berakar pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan, mereka menanamkan kesadaran bahwa media sosial bukan tempat penyebaran kebencian atau provokasi, tetapi sarana dialog sehat dan pembangunan gagasan konstruktif bagi kemajuan bangsa. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dengan komitmen pada moralitas dan etika publik, organisasi-organisasi tersebut dapat menjadi teladan dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan realitas sosial-politik modern. Kehadiran mereka menegaskan bahwa moralitas bukan penghambat kemajuan, melainkan fondasi bagi tata kelola politik yang adil dan beradab. Mereka berfungsi tidak hanya sebagai pengingat, tetapi juga sebagai motor perubahan sosial yang menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan kematangan moral. Karena itu, keberadaan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa politik digital Indonesia berkembang dalam bingkai nilai etika, keagamaan, dan kebangsaan yang kuat.

Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara Islam dan etika digital (Nasir, 2022; Wahyudi, 2023), masih terbatas penelitian yang secara eksplisit menganalisis implementasi etika politik Islam dalam ruang politik digital di Indonesia. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya menyoroti etika komunikasi umat Islam di dunia maya, tetapi juga menegaskan nilai-nilai normatif Islam yang dapat membimbing kewargaan digital Muslim yang etis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika politik Islam dalam politik Islam digital di Indonesia, dengan menekankan peran umat Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU, dalam menegakkan etika politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat paradigma etika digital Islam sebagai landasan pembentukan budaya politik yang sadar moral dan bertanggung jawab secara kewargaan di Indonesia.

Di Indonesia, dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan NU, memegang peran strategis sebagai penjaga moral publik dan etika politik Islam. Muhammadiyah menekankan dakwah rasional, pencerahan, dan penanaman tanggung jawab sosial di kalangan warga digital. Melalui berbagai kanal digital seperti TV Muhammadiyah dan Suara Muhammadiyah Online, Muhammadiyah secara aktif menyebarkan dakwah politik berkeadaban yang bebas dari ujaran kebencian, berorientasi pada pencerahan masyarakat (tanwir), bukan mobilisasi politik partisan.

Sementara itu, NU dengan nilai tasamuh, tawassuth, dan tawazun menekankan kesantunan dan etika dalam komunikasi digital. Melalui NU Online dan NU Channel, NU secara aktif melawan radikalisme digital dan mempromosikan etika bermedia sosial yang sejalan dengan etika politik Islam. NU juga mengembangkan model dakwah kultural yang menyesuaikan tuntutan agama dengan konteks sosial dan budaya Indonesia tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Kedua organisasi tersebut bertindak sebagai pilar moral bangsa, memastikan bahwa politik Islam tetap berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan. Baik Muhammadiyah maupun NU menolak segala bentuk politisasi agama yang mengabaikan etika publik, sekaligus menjadi contoh konkret implementasi etika politik Islam dalam demokrasi digital.

Lanskap Politik Islam dan Organisasi Massa di Indonesia:

Hingga tahun 2025, Indonesia masih memiliki beberapa partai politik berbasis Islam yang aktif dan berpengaruh di tingkat nasional maupun regional.

Adapun partai-partai utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Partai Politik Islam yang Aktif dan Berpengaruh

No	Partai Politik Islam	Karakteristik Ideologis	Status (2024–2025)
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Islam tradisionalis, moderat	Aktif, memiliki kursi di DPR RI
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Berbasis NU, pluralis	Aktif, stabil di parlemen
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	Berbasis Muhammadiyah, reformis	Aktif, pro-reformasi
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Islamis, secara moral konservatif	Aktif, kuat di ranah digital
5	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)	Islam modernis, nasionalis	Aktif, tetapi belum dominan
6	Partai Ummat	Islamis, oposisi moral	Sedang berkembang

Selain partai politik, Indonesia juga memiliki beberapa organisasi massa Islam terbesar di dunia:

Tabel 2. Organisasi Massa Islam yang Aktif dan Berpengaruh

No	Organisasi Massa Islam	Perkiraan Jumlah Anggota	Karakteristik
1	Nahdlatul Ulama (NU)	±100 juta	Tradisionalis, kultural, moderat
2	Muhammadiyah	±60 juta	Modernis, rasional, progresif
3	Persis (Islamic Union)	±5 juta	Puritan, intelektual
4	Al-Irsyad Al-Islamiyyah	±2 juta	Modernis, Arab-Indonesia
5	Hidayatullah	±1 juta	Dakwah dan pendidikan
6	Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)	±500 ribu	Dakwah politik Islam

Keberagaman partai dan organisasi ini menunjukkan besarnya kekuatan sosial-politik Islam di Indonesia. Namun, potensi tersebut sering kali melemah karena tidak adanya visi moral yang bersatu dan etika politik yang sama.

Sistem politik Indonesia masih mengikuti kerangka multi-partai, di mana berbagai partai Islam beroperasi dengan basis ideologis dan kultural yang berbeda-beda. Meskipun semuanya mengaku berlandaskan nilai-nilai Islam, orientasi politik mereka sering kali menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam visi dan strategi. Dalam sistem ini, partai-partai Islam tidak hanya bersaing dengan partai-partai nasionalis tetapi juga satu sama lain, masing-masing dengan interpretasi dan pendekatan yang beragam. Keragaman ini memang mencerminkan dinamika demokrasi yang sehat, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan dalam membangun visi politik yang bersatu secara etis dan moral di antara partai-partai Islam (Setiawan & Nurhadi, 2023, hlm. 101).

Dalam praktik kampanye dan komunikasi politik, tidak semua partai Islam memprioritaskan etika politik Islam, yaitu moralitas dan tanggung jawab etis, sebagai prinsip dasar. Kampanye politik sering ditandai dengan retorika sektarian, polarisasi, dan strategi elektoral yang pragmatis. Hal ini menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia masih berada pada fase transisi antara idealisme moral dan realitas persaingan kekuasaan. Etika politik Islam menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk kepentingan kelompok atau individu (Hidayat, 2021, hlm. 163).

Kurangnya kesatuan moral di antara partai-partai Islam berdampak pada citra publik politik Islam. Ketika masyarakat menyaksikan konflik dan saling serang antarpertai Islam, kepercayaan terhadap nilai-nilai politik Islam menurun. Hal ini tidak hanya memengaruhi hubungan internal umat Islam, tetapi juga persepsi non-Muslim terhadap Islam sebagai agama rahmat dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan konsensus dan komitmen bersama di antara partai-partai Islam untuk memprioritaskan nilai-nilai etis dan moral dalam politik (Nurhasanah, 2020, hlm. 48).

Membangun visi bersama ini harus dimulai dari kesadaran bahwa dakwah politik tidak boleh dibatasi pada perebutan kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan kebaikan sosial. Etika politik Islam dapat menjadi landasan moral yang mempersatukan partai-partai Islam dalam keterlibatan politik yang konstruktif. Arah moral yang sama juga membantu mengembalikan politik Islam pada hakikatnya sebagai tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat dan bangsa (Hidayat, 2021, hlm. 165).

Dengan demikian, kesatuan dalam perspektif dan penerapan etika politik Islam sangat penting untuk menjaga citra positif Islam di mata umat Islam maupun non-Muslim. Politik Islam yang etis tidak hanya memperkuat posisi umat dalam sistem demokrasi, tetapi juga menunjukkan kapasitas Islam sebagai inspirasi moral

dan solusi bagi peradaban modern. Jika nilai-nilai moral Islam diadopsi sebagai pedoman bersama, politik Islam dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana perebutan kekuasaan, tetapi sebagai jalan menuju keadilan sosial dan kesejahteraan universal (Ropi, 2020, hlm. 627).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis penelitian kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, prosiding konferensi, buku, dan dokumen resmi dari organisasi Islam yang relevan dengan tema politik Islam, etika politik Islam, dan etika digital. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis isi tematik untuk mengidentifikasi pola, nilai moral, dan implikasi etis dari praktik politik digital dalam perspektif etika politik Islam.

Pemilihan pendekatan penelitian kepustakaan didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, fenomena penjaga moral digital dalam politik Islam Indonesia lebih tepat dikaji melalui analisis teks dan dokumen daripada observasi perilaku, karena ia terutama termanifestasi dalam bentuk wacana, pernyataan publik, artikel keagamaan, dan konten media digital (Wahyudi, 2023, hlm. 45). Fenomena ini berkembang dalam ruang simbolik yang direproduksi melalui media daring seperti YouTube, Instagram, dan portal berita Islam. Oleh karena itu, kajian literatur memungkinkan peneliti menelusuri dinamika wacana moral digital tanpa bergantung hanya pada data lapangan empiris.

Kedua, pendekatan ini memungkinkan analisis normatif dan filosofis, terutama karena konsep etika politik Islam berasal dari pemikiran Islam klasik yang terekam dalam manuskrip, tafsir, dan karya para ulama terdahulu (Al-Mawardi, 2018, hlm. 33; Al-Ghazali, 2019, hlm. 72). Melalui sumber-sumber tersebut, penelitian ini dapat memahami secara komprehensif nilai-nilai etis dalam politik Islam, seperti 'adl (keadilan), amanah (tanggung jawab moral), dan maslahah 'ammah (kesejahteraan publik). Pendekatan normatif memungkinkan peneliti menilai sejauh mana prinsip-prinsip klasik tersebut tetap relevan dan dapat diadaptasikan dalam konteks komunikasi politik digital kontemporer (Shihab, 2019, hlm. 101).

Ketiga, penelitian kepustakaan memberikan kemungkinan untuk membangun model konseptual baru yang mensintesis tradisi Islam dengan praktik politik digital modern (Neuman, 2014, hlm. 42–44). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga reflektif, menghubungkan teks-teks normatif Islam dengan konteks sosial-politik digital masa kini. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi pola nilai, prinsip moral, dan praktik etis umat Islam di ruang digital, serta menjelaskan bagaimana organisasi Islam seperti

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) berperan sebagai penjaga moral dalam lanskap politik digital Indonesia (Fauzi, 2023, hlm. 56).

Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang dapat diakses baik secara daring maupun luring. Seluruh data bersifat sekunder, karena diperoleh dari pemikiran dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema politik Islam, etika politik Islam, dan etika digital (Creswell & Poth, 2018, hlm. 93).

Jenis-jenis sumber literatur yang digunakan meliputi:

1. Jurnal ilmiah online yang terindeks Sinta, Scopus, dan DOAJ, seperti Jurnal *Al-Mustashfa*, Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam, dan Prosiding Konferensi *DICIS*. Jurnal-jurnal ini menyediakan kajian terkini tentang etika digital, dakwah politik, dan moralitas publik dalam Islam (Ismail, 2022, hlm. 128; Rahmad, 2021, hlm. 91; Wahyudi, 2023, hlm. 47).
2. Prosiding konferensi, khususnya *Digital Communication and Islamic Studies* (*DICIS*) dan publikasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang dikenal aktif menerbitkan penelitian tentang etika media dan dakwah Islam digital (Dirundeng, 2023, hlm. 5).
3. Buku dan karya akademik yang membahas nilai-nilai etika politik Islam, komunikasi Islam, dan etika sosial-keagamaan sebagai rujukan utama untuk memahami konstruksi moral dalam politik Islam digital. Di antaranya: Quraish Shihab (2019, hlm. 87–92) Wawasan *Al-Qur'an* tentang Etika Sosial dan Politik; Alwi Shihab (2022, hlm. 115) Islam Inklusif dan Toleransi Digital; dan Syafiq Hasyim (2021, hlm. 66–70) Islam, Gender, dan Ruang Publik Digital.
4. Sumber Islam klasik, seperti karya Al-Mawardi (*Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*), Al-Ghazali (*Ihya' Ulum al-Din*), dan Ibn Khaldun (*Muqaddimah*), yang menjadi landasan filosofis bagi etika pemerintahan dan tanggung jawab moral dalam Islam (Ibn Khaldun, 2018, hlm. 24–26).
5. Dokumen resmi organisasi Islam besar di Indonesia, seperti Pedoman Etika Bermedia Muhammadiyah (2023) dan Deklarasi Moderasi Digital Nahdlatul Ulama (2022). Dokumen-dokumen ini memberikan bukti konkret bagaimana organisasi massa Islam menafsirkan nilai dakwah dan komunikasi etis dalam konteks politik digital modern (Muhammadiyah, 2023, hlm. 2; Nahdlatul Ulama, 2022, hlm. 3).

Selain sumber tertulis, penelitian ini juga memanfaatkan media digital, seperti kanal YouTube resmi TV Mu Official (Muhammadiyah) dan NU Online Official (Nahdlatul Ulama) untuk menelusuri praktik dakwah etis, penyebaran nilai moderasi, dan komunikasi publik Islam di ruang siber.

Seluruh data dianalisis menggunakan analisis isi tematik. Tahapan analisis meliputi:

1. Identifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan etika politik Islam dan moralitas digital.
2. Klasifikasi nilai-nilai etis dalam teks klasik dan kontemporer.
3. Sintesis data untuk merumuskan model etika politik Islam di ruangdigital yang relevan bagi umat Islam dan organisasi Islam kontemporer.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana prinsip etika politik Islam dapat menjadi landasan dalam pengembangan etika politik digital yang beradab, berbudaya, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa etika politik Islam dalam konteks digital termanifestasi dalam tiga bentuk penerapan utama:

1. Etika komunikasi politik Islam, yang menekankan kejujuran, kesantunan, dan tanggung jawab sosial dalam interaksi daring.
2. Penguatan moralitas publik melalui dakwah digital, di mana umat Islam berperan sebagai penjaga kebenaran, menghindari fitnah, serta melakukan *tabayyun* (verifikasi) sebelum menyebarkan informasi.
3. Pembentukan kewargaan Muslim yang etis, dengan menyeimbangkan kebebasan berekspresi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum.

Muhammadiyah dan NU menjadi contoh konkret aktor kelembagaan yang menerapkan nilai-nilai tersebut. Muhammadiyah mendorong dakwah digital yang progresif melalui kanal resmi dan pelatihan literasi digital bagi kader-kadernya. NU menekankan dakwah siber yang moderat, menolak ujaran kebencian, serta menanamkan nilai *ukhuwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan).

Analisis juga menunjukkan bahwa meskipun partai-partai Islam memiliki dasar ideologis yang sama yakni mengusung nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa mereka belum memiliki visi yang bersatu dalam penerapan prinsip etika politik Islam. Kompetisi politik sering kali menimbulkan fragmentasi internal di kalangan umat Islam, di mana kepentingan elektoral lebih diprioritaskan dibandingkan moralitas Islam itu sendiri.

1. Kebutuhan akan Visi Bersama dalam Etika politik Islam

Penelitian ini menemukan bahwa penyatuan visi politik Islam harus dimulai dari kesepakatan moral. Semua partai Islam perlu mengadopsi kerangka dakwah dan kampanye yang sama, berlandaskan etika politik Islam, bukan kepentingan sementara atau narasi sektarian. Dakwah politik yang tidak memiliki landasan etis

hanya akan memperdalam polarisasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap Islam sebagai sumber nilai moral.

2. Implikasi dari Fragmentasi Umat

Fragmentasi dalam politik Islam mengurangi potensi umat untuk memengaruhi kebijakan publik. Ketika partai-partai Islam bersaing dengan menggunakan retorika keagamaan yang keras, publik bisa menjadi jenuh terhadap nilai-nilai Islam dan memandang politik Islam identik dengan konflik. Hal ini bertentangan dengan semangat *ukhuwah wathaniyyah* dan *ukhuwah Islamiyyah* yang diajarkan dalam etika politik Islam.

3. Sinergi dalam Dakwah Politik Digital

Muhammadiyah dan NU dapat berperan sebagai jembatan untuk mempersatukan visi politik Islam melalui dakwah politik digital yang etis. Melalui media sosial, lembaga pendidikan, dan jaringan pesantren, kedua organisasi ini dapat membangun kesadaran kolektif bahwa dakwah politik bukan semata untuk memenangkan kekuasaan, tetapi untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan keadaban publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik etika politik Islam dalam ruang digital telah menjadi sarana efektif untuk menegakkan moralitas Islam dalam politik. Fenomena penjaga moral digital dapat dipahami sebagai ekspresi kontemporer dari *amar ma'ruf nahi munkar* di era media baru. Namun, tantangan utamanya adalah penyebaran disinformasi yang sangat cepat, polarisasi, dan politik identitas, yang sering kali mengaburkan batas antara dakwah dan propaganda (Ismail, 2022; Hassan, 2020).

Etika politik Islam menuntut setiap Muslim untuk berpartisipasi secara konstruktif di ruang publik tanpa terjerumus pada ekstremisme moral atau fanatisme ideologis. Dalam hal ini, Muhammadiyah dan NU berperan sebagai kompas moral bangsa, memastikan bahwa politik tetap berorientasi pada nilai kemaslahatan umum dan kemanusiaan (Ismail, 2022; Yusuf, 2022). Dengan demikian, etika politik Islam bukan hanya konsep teologis, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi warga digital Muslim dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam politik secara etis.

Analisis menunjukkan bahwa meskipun partai-partai Islam memiliki dasar ideologis yang sama yaitu mengusung nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa mereka belum memiliki visi bersama dalam penerapan prinsip etika politik Islam. Kompetisi politik sering kali menimbulkan fragmentasi internal di kalangan umat Islam, di mana kepentingan elektoral lebih diprioritaskan dibandingkan nilai-nilai moral Islam itu sendiri (Rahman, 2021).

1. Kebutuhan Visi Bersama dalam Etika politik Islam

Penelitian ini menemukan bahwa penyatuan visi politik Islam harus dimulai dari penyelarasan moral. Semua partai Islam perlu memiliki landasan yang sama dalam

dakwah dan kampanye politik, yang berakar pada etika politik Islam, bukan pada kepentingan jangka pendek atau narasi sektarian. Dakwah politik yang tidak memiliki landasan etis hanya akan memperdalam polarisasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap Islam sebagai sumber tuntunan moral (Hassan, 2020).

2. Implikasi Fragmentasi di Kalangan Umat

Fragmentasi dalam politik Islam melemahkan potensi umat untuk memengaruhi kebijakan publik. Ketika partai-partai Islam bersaing dengan menggunakan retorika keagamaan yang keras, masyarakat menjadi jauh dari nilai-nilai Islam dan memandang politik Islam identik dengan konflik. Hal ini bertentangan dengan semangat *ukhuwah wathaniyyah* dan *ukhuwah Islamiyyah* yang diajarkan dalam etika politik Islam (Rahman, 2021).

3. Sinergi dalam Dakwah Politik Digital

Muhammadiyah dan NU dapat berperan sebagai jembatan pemersatu visi politik Islam melalui pendekatan dakwah digital yang etis. Melalui media sosial, lembaga pendidikan, dan jaringan pesantren, kedua organisasi ini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa dakwah politik bukan tentang meraih kekuasaan, melainkan tentang menegakkan keadilan, kejujuran, dan keadaban publik (Yusuf, 2022).

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa etika politik Islam menjadi landasan moral yang sangat penting dalam pengembangan etika politik digital Islam di Indonesia. Praktik *digital moral guardians* mencerminkan tumbuhnya kesadaran di kalangan Muslim untuk menegakkan nilai keadilan, keadaban, dan tanggung jawab sosial di ruang digital. Peran Muhammadiyah dan NU sangat sentral dalam menjaga etika politik Islam, mencegah degradasinya oleh pragmatisme dan polarisasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital Islami berbasis etika politik Islam menjadi sangat penting agar umat Islam mampu menjadi warga digital yang etis, moderat, dan beradab. Etika politik Islam memberikan dasar moral yang kuat bagi etika politik Islam di era digital.

Dalam konteks Indonesia, penerapannya sangat penting untuk menjaga keadaban politik dan mencegah penyalahgunaan agama sebagai alat politik. Muhammadiyah dan NU sebagai kekuatan sosial terbesar di kalangan Muslim telah berkontribusi aktif dalam menjaga moral publik dan menumbuhkan etika digital yang berlandaskan nilai Islam moderat dan rasional. Namun, fragmentasi yang masih terjadi di antara partai politik Islam menunjukkan bahwa visi moral yang bersatu belum sepenuhnya terwujud. Komitmen bersama dari seluruh partai Islam dan organisasi keagamaan diperlukan untuk menyepakati etika politik Islam sebagai

pedoman bersama dalam seluruh bentuk dakwah, kampanye, dan komunikasi politik.

Pemerintah, lembaga pendidikan Islam, dan organisasi keagamaan perlu bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum etika digital Islami serta pelatihan etika siber untuk memperkuat karakter kewargaan Muslim di ruang digital.

1. Partai politik Islam di Indonesia perlu merumuskan *Piagam Etika politik Islam Nasional* berbasis etika politik Islam sebagai pedoman dakwah dan kampanye.
2. Muhammadiyah dan NU dapat bekerja sama membentuk "Dewan Etika politik Islam Digital" untuk memantau konten politik Islam di media sosial.

Pendidikan politik Islam perlu mengintegrasikan kurikulum etika politik Islam digital agar generasi muda Muslim memahami politik bukan sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai amanah moral untuk kemaslahatan publik.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (2019). *Ihya' Ulum al-Din* (hlm. 70–75). Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Mawardi. (2018). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam* (hlm. 30–40). Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Keagamaan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (ed. ke-4, hlm. 90–100). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Dirundeng, T. (2023). Prosiding Digital Communication and Islamic Studies (DICIS) (hlm. 1–15). STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Press
- Fauzi, A. (2023). *Moderasi Beragama dan Etika Media dalam Dakwah Digital NU dan Muhammadiyah* (hlm. 50–60). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press
- Fauzi, M. (2023). Etika Digital dan Dakwah Moderat Nahdlatul Ulama di Media Sosial. *Prosiding Konferensi DICIS*, 2(1), 112–125
- Hassan, N. (2020). Etika politik Islam di Ranah Digital: Tantangan dan Peluang. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 11(2), 145–162
- Hidayat, A. (2021). Etika politik Islam: Etika politik Islam sebagai Dasar Kepemimpinan Beradab. *Jurnal Politik Islam*, 13(2), 155–170. <https://doi.org/10.24042/jpi.v13i2.8712>

Ibn Khaldun. (2018). Muqaddimah Ibn Khaldun (hlm. 20–30). Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi

Ismail, A. (2022). Islam Digital dan Politik Moral di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 15(2), 121–139. <https://doi.org/10.xxxx/jidki.v15i2.2022>.

Ismail, Z. (2022). Moralitas Politik Islam di Era Digital: Perspektif AkhlAQ Siyasah. *Jurnal Al-Mustashfa*, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 8(2), 145–160

Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). (2024). Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan Alokasi Kursi DPR RI. <https://www.kpu.go.id>

Muhammadiyah. (2023). Pedoman Etika Media Muhammadiyah (hlm. 1–5). Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah. (2024). Laporan Tahunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. <https://www.muhammadiyah.or.id>

Mujani, S., & Liddle, R. W. (2023). Partai Islam dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 45–68. <https://doi.org/10.1177/18681034231100321>

Nahdlatul Ulama (NU). (2024). Profil Organisasi dan Pengembangan Keanggotaan. Situs Resmi PBNNU. <https://www.nu.or.id>

Nahdlatul Ulama. (2022). Deklarasi Moderasi Digital NU (hlm. 2–4). Jakarta: Divisi Digital PBNNU.

Nasir, A. (2022). Etika Dakwah Digital dan Tantangan Polarisasi Politik di Kalangan Muslim Indonesia. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 6(1), 78–93

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (ed. ke-7, hlm. 40–50). Boston: Pearson Education

Nurhasanah, S. (2020). Moralitas Politik dalam Perspektif Islam: Relevansi Etika dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 9(1), 35–52. <https://doi.org/10.15642/ad.v9i1.1658>

Politik Indonesia. Prosiding DICIS, 3(1), 95–110

PPIM UIN Jakarta. (2022). Pemetaan Organisasi Islam di Indonesia: Ideologi, Jaringan, dan Keterlibatan Politik. <https://ppim.uinjkt.ac.id>

- Rahmad, F. (2021). Politik Identitas dan Erosi Etika politik Islam di Ruang Publik Digital. Prosiding DICIS, 1(2), 56–68
- Rahmad, I. (2021). Dakwah Politik Islam di Era Digital: Antara Etika dan Polarisasi. Jurnal Al-Mustashfa, 12(3), 87–104. <https://doi.org/10.xxxx/jam.v12i3.2021>
- Rahman, F. (2021). Fragmentasi Politik dan Partai Islam di Indonesia Pasca-Reformasi. Southeast Asian Political Review, 9(1), 33–49
- Ropi, I. (2020). Arus Utama Islam Moderat: Peran Sosial Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Indonesia Kontemporer. Studia Islamika, 27(3), 611–638. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.14183>
- Ropi, I. (2020). Arus Utama Islam Moderat: Peran Sosial Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Indonesia Kontemporer. Studia Islamika, 27(3), 611–638. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.14183>
- Setiawan, B., & Nurhadi, H. (2023). Peta Ideologi Partai Politik Islam di Indonesia Pasca-Reformasi. Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia, 14(2), 97–115. <https://doi.org/10.21009/jppi.14.2.97>
- Setiawan, B., & Nurhadi, H. (2023). Peta Ideologi Partai Politik Islam di Indonesia Pasca-Reformasi. Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia, 14(2), 97–115. <https://doi.org/10.21009/jppi.14.2.97>
- Shihab, A. (2022). Islam Inklusif dan Toleransi Digital (hlm. 110–120). Bandung: Mizan
- Shihab, M. Q. (2019). Wawasan Al-Qur'an tentang Etika Sosial dan Politik (hlm. 85–110). Jakarta: Lentera Hati
- Syafiq, H. (2021). Islam, Gender, dan Ruang Publik Digital (hlm. 60–75). Jakarta: Gramedia
- Wahyudi, A. (2023). Etika Digital dan Politik Moral Muslim Indonesia. Journal of Islamic Communication Studies, 5(1), 44–59
- Wahyudi, A. (2023). Kewargaan Digital Islami dan Tanggung Jawab Etis dalam
- Yusuf, M. (2022). Dakwah Digital dan Kepemimpinan Moral Organisasi Muslim di Indonesia. Journal of Islamic Media and Society, 7(3), 210–225